



## INTEGRASI DATA STUNTING DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BONE BOLANGO

**Roswaty Agus<sup>1</sup>, Azis Rachman<sup>2\*</sup>, Ikram Muhammad<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia

roswatagyagus@gmail.com; azis.rachman@ubmg.ac.id\*; ikram.muhammad@ubmg.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan data stunting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat integrasi data tersebut ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Stunting merupakan salah satu isu strategis pembangunan manusia yang masih menjadi prioritas nasional, dan Kabupaten Bone Bolango termasuk daerah yang menghadapi tantangan dalam upaya penurunannya. Ketersediaan data terkait prevalensi stunting relatif memadai, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam dokumen perencanaan tahunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain case study, melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, analisis dokumen perencanaan, serta observasi partisipatif pada forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data stunting dalam RKPD masih terbatas karena fragmentasi sumber data, perbedaan metodologi pengukuran antarinstansi, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal. Di sisi lain, penerapan sistem informasi pembangunan dan dukungan regulasi memberikan peluang untuk memperkuat integrasi data dalam proses perencanaan. Kesimpulannya, penguatan tata kelola data stunting melalui koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan sistem informasi yang terpadu merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta mendukung pencapaian target penurunan stunting di Kabupaten Bone Bolango.

**Kata kunci:** kebijakan perencanaan daerah, RKPD, integrasi data, stunting, Bone Bolango

### Abstract

*This study aims to analyze the use of stunting data in the preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) of Bone Bolango Regency, while also identifying supporting and inhibiting factors for integrating this data into regional development planning policies. Stunting is a strategic human development issue that remains a national priority, and Bone Bolango Regency faces challenges in its reduction efforts. Data on stunting prevalence is relatively adequate, but has not been fully integrated systematically into annual planning documents. This study used a qualitative approach with a case study design, through in-depth interviews with key stakeholders, analysis of planning documents, and participant observation at the development planning deliberation forum (Musrenbang). The results indicate that the use of stunting data in the RKPD is still limited due to fragmented data sources, differences in measurement methodologies between agencies, and suboptimal coordination across regional agencies. On the other hand, the implementation of a development information system and regulatory support provide opportunities to strengthen data integration in the planning process. In conclusion, strengthening stunting data governance through cross-sector coordination and utilizing an integrated information system is an important prerequisite for producing more targeted development planning and supporting the achievement of stunting reduction targets in Bone Bolango Regency.*

**Keywords:** regional planning policy, RKPD, data integration, stunting, Bone Bolango

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2025

\* Corresponding author :

Address : Gorontalo, Indonesia

Email : azis.rachman@ubmg.ac.id

## PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu dimensi penting dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia. Salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah status gizi anak, khususnya prevalensi stunting. Stunting tidak hanya merepresentasikan permasalahan gizi kronis, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, capaian pendidikan, serta produktivitas ekonomi di masa depan. Dengan demikian, penanganan stunting menuntut perhatian serius sebagai isu pembangunan lintas sektor.

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,6%, turun dari 24,4% pada 2021. Pemerintah menargetkan prevalensi tersebut turun hingga 14% pada 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun terdapat penurunan, capaian tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan kondisi sosial ekonomi dan akses pelayanan publik yang beragam. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang masih berhadapan dengan persoalan tersebut. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa prevalensi stunting di sejumlah kabupaten, termasuk Bone Bolango, masih berada di atas target nasional. Walaupun tren penurunan mulai terlihat, angka tersebut menandakan perlunya strategi yang lebih sistematis dan terintegrasi. Hal ini memperkuat urgensi untuk mengaitkan penanggulangan stunting tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman tahunan dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah. Idealnya, RKPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan data empiris, termasuk data kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyusunan RKPD di berbagai daerah masih cenderung normatif serta belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based planning). Salah satu tantangan dalam mengintegrasikan isu stunting ke dalam RKPD adalah pemanfaatan data yang belum optimal. Data stunting tersedia dari berbagai sumber, seperti survei nasional, laporan Dinas Kesehatan, maupun catatan Puskesmas dan desa. Akan tetapi, data tersebut sering terfragmentasi, tidak seragam, dan belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Kondisi ini dapat berdampak pada penetapan prioritas, pengalokasian anggaran, dan efektivitas program pembangunan sumber daya manusia (Yovitasari, 2024).

Penelitian internasional menekankan bahwa perencanaan pembangunan berbasis data memiliki dampak signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting. (Gillespie et al., 2015) menyatakan bahwa intervensi gizi yang berhasil selalu diawali dengan pemanfaatan data lokal, koordinasi lintas sektor, dan

libat masyarakat. Namun, sejumlah kajian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip perencanaan berbasis data masih menghadapi keterbatasan pada level daerah. Penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara perencanaan pembangunan dengan isu kesehatan. (Rizky Nurfadani & Hendiyani, 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan prioritas yang masuk dalam RKPD. Sementara itu, (Sari, 2023) menemukan bahwa meskipun data stunting tersedia, pemanfaatannya dalam dokumen perencanaan masih terbatas karena kecenderungan menggunakan data makro dari pusat. Dari kajian tersebut dapat dilihat adanya upaya awal ke arah perencanaan berbasis data. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana data stunting diintegrasikan dalam penyusunan RKPD di daerah, khususnya Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian, terdapat research gap terkait mekanisme, kendala, dan peluang pengintegrasian data stunting dalam proses perencanaan tahunan daerah.

Kesenjangan penelitian ini relevan untuk dikaji lebih lanjut karena Kabupaten Bone Bolango memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dengan daerah lain. Faktor ketersediaan layanan kesehatan, kondisi infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan daerah berpengaruh terhadap sejauh mana data dapat digunakan dalam perencanaan. Kajian mendalam mengenai konteks lokal akan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai permasalahan integrasi data.

Secara praktis, penelitian ini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat menjadikan penanggulangan stunting sebagai prioritas pembangunan tahunan melalui RKPD. Integrasi data yang lebih baik diyakini mampu memperbaiki akurasi perencanaan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan memperkuat akuntabilitas kebijakan publik.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai perencanaan pembangunan berbasis bukti pada level daerah. Konsep integrasi data dalam kebijakan publik masih relatif baru dalam kajian administrasi publik di Indonesia, sehingga penelitian empiris di daerah dapat memberikan kontribusi signifikan. Relevansi penelitian ini juga berkaitan dengan kebijakan nasional yang mendorong penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai platform utama dalam perencanaan. Namun, penelitian Yuliani (2020) menunjukkan bahwa meskipun SIPD berpotensi meningkatkan keterbukaan data, tantangan masih ditemukan pada aspek konsistensi input data dan koordinasi antarperangkat daerah.

Oleh karena itu, penelitian mengenai integrasi data stunting dalam penyusunan RKPD Bone Bolango diharapkan dapat menjawab kekosongan kajian yang ada. Fokus penelitian tidak hanya pada ketersediaan data, melainkan juga pada dinamika integrasi, hambatan koordinasi, serta potensi pemanfaatan sistem informasi

pembangunan. Secara konseptual, integrasi data dipandang sebagai elemen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui pendekatan ini, perencanaan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan target pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan (Akibu, 2025). Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan data stunting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Manfaat penelitian bersifat ganda: secara teoretis, memperkaya literatur tentang kebijakan perencanaan berbasis data; secara praktis, memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data dan meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena integrasi data stunting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara rinci proses, kondisi, serta dinamika yang berlangsung di lapangan (Creswell, 2024). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor yang berperan langsung dalam perencanaan pembangunan, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan Puskesmas, serta perangkat pemerintah desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen perencanaan, laporan kinerja daerah, serta data prevalensi stunting dari instansi terkait.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menitikberatkan pada pengorganisasian informasi, identifikasi pola, serta penafsiran makna atas fenomena yang ditemukan. Prosedur analisis meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kredibilitas hasil penelitian dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan metode, sehingga data yang diperoleh dapat divalidasi dari berbagai perspektif (Sumilih et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik integrasi data stunting dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Bone Bolango.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi data stunting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi keterbatasan. Meskipun data prevalensi stunting tersedia di berbagai instansi, pemanfaatannya dalam perencanaan belum optimal. Kondisi serupa diidentifikasi oleh Sari dan Putra (2022), yang mencatat bahwa data stunting di sejumlah daerah lebih sering dijadikan informasi

tambahan, bukan sebagai dasar utama penentuan prioritas pembangunan. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar perangkat daerah masih belum berjalan secara optimal. Bappeda sebagai koordinator perencanaan belum sepenuhnya mampu menyatukan data yang dikelola Dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan (Rani, 2024), yang menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi lintas sektor dapat menimbulkan inkonsistensi data serta menurunkan kualitas perencanaan berbasis bukti.

Hasil observasi juga memperlihatkan adanya fragmentasi data yang bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), laporan rutin Dinas Kesehatan, dan catatan Puskesmas. Perbedaan metodologi pengumpulan data menimbulkan variasi angka prevalensi yang menyulitkan konsistensi program. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian (Sentanu et al., 2024) menegaskan bahwa perbedaan metode pengumpulan data sering menjadi kendala dalam kebijakan berbasis bukti. Kapasitas teknis sumber daya manusia menjadi faktor lain yang memengaruhi integrasi data. Beberapa aparatur daerah masih terbatas dalam hal keterampilan mengolah dan menganalisis data untuk mendukung proses perencanaan. Peningkatan kapasitas teknis merupakan komponen penting dalam membangun perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah mulai menunjukkan perhatian terhadap isu perencanaan berbasis data. Isu stunting semakin sering dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Hal ini konsisten dengan (Faturahman & Adzikri, 2025) yang menyatakan bahwa forum musrenbang dapat menjadi media untuk meningkatkan keterlibatan isu kesehatan dalam dokumen perencanaan, meskipun keputusan akhir masih dipengaruhi oleh dinamika anggaran. Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga telah mulai diimplementasikan di Kabupaten Bone Bolango. Namun, penerapannya dalam integrasi data stunting masih terbatas. (Putri & Purnamawati, 2025) menunjukkan bahwa meskipun SIPD memiliki potensi memperkuat transparansi dan konsistensi data, hambatan teknis dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur daerah masih menjadi kendala.

Analisis dokumen RKPD menunjukkan bahwa program penurunan stunting telah tercantum, tetapi indikator yang digunakan belum sepenuhnya merujuk pada data prevalensi lokal, di mana indikator pembangunan daerah lebih sering didasarkan pada target normatif daripada kondisi empiris. Wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan adanya perbedaan persepsi terkait penggunaan data. Sebagian instansi lebih mempercayai data nasional, sementara yang lain menganggap data lokal lebih representatif. Faktor politik turut berperan dalam menentukan sejauh mana data digunakan dalam penyusunan RKPD. Prioritas pembangunan sering kali dipengaruhi oleh arah kebijakan kepala daerah. (Nugroho, 2022) menekankan bahwa *political will* kepala daerah merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan berbasis data, termasuk di sektor kesehatan.

Di sisi lain, terdapat peluang untuk memperkuat integrasi data melalui dukungan regulasi nasional. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan kerangka normatif yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan data stunting dalam dokumen perencanaan. (Malau et al., 2024) menegaskan bahwa dukungan regulasi pusat dapat meningkatkan konsistensi kebijakan di tingkat daerah.

Keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti perguruan tinggi dan lembaga masyarakat, juga dapat memperkuat integrasi data. Perguruan tinggi dapat membantu menyediakan data tambahan yang relevan melalui riset lokal. (Suprayitno et al., 2024) mengemukakan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi mampu menghasilkan data yang lebih kontekstual untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa persoalan integrasi data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. (Gillespie et al., 2015) menyatakan bahwa keberhasilan program penurunan stunting bergantung pada koordinasi lintas sektor yang efektif serta tata kelola data yang baik. Situasi di Bone Bolango menunjukkan bahwa tata kelola tersebut masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan *evidence-based planning* belum sepenuhnya terimplementasi di daerah. Hal ini konsisten dengan (Iswanto, 2023) yang mengemukakan bahwa meskipun perencanaan berbasis bukti telah diakui secara normatif, penerapannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural di tingkat lokal.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi yang lebih sistematis dalam memperkuat integrasi data. Strategi tersebut mencakup peningkatan kapasitas teknis aparatur, harmonisasi metodologi pengumpulan data, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Strategi tata kelola data yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mempercepat pencapaian target pembangunan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi data stunting dalam RKPD Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi sejumlah kendala, tetapi terdapat peluang untuk perbaikan melalui dukungan regulasi, peningkatan kapasitas teknis, serta kolaborasi multipihak. Dengan mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah berpotensi menghasilkan perencanaan yang lebih akurat, akuntabel, dan relevan dengan kondisi lokal, sehingga mendukung percepatan penurunan stunting serta penguatan pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi data stunting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Tantangan yang diidentifikasi mencakup fragmentasi data antarinstansi, perbedaan metodologi pengumpulan data, keterbatasan

kapasitas teknis aparatur, serta koordinasi lintas sektor yang belum konsisten. Walaupun demikian, penelitian juga menunjukkan adanya peluang penguatan melalui dukungan regulasi nasional, pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah, serta inisiatif kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Secara umum, penguatan integrasi data berpotensi meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas kebijakan, serta akuntabilitas pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan penurunan stunting dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi yang sistematis untuk memperkuat integrasi data dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi yang dimaksud meliputi peningkatan kapasitas teknis aparatur perencana, harmonisasi metodologi pengumpulan data antarinstansi, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pendukung. Selain itu, koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui mekanisme tata kelola data yang lebih terpadu, disertai dengan pelibatan perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam penyediaan maupun validasi data. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan berbasis bukti yang lebih relevan dengan kondisi lokal, sehingga berkontribusi pada pencapaian target penurunan stunting dan penguatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bone Bolango.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 44–64.
- Akibu, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Integrasi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 107.
- Creswell, W. (2024). 4.2. Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 45.
- Faturahman, B. M., & Adzikri, Q. N. (2025). Desain Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Mitigasi Bencana di Kabupaten Pacitan [Decision-Making Design in Village Development Planning Deliberations in The Field of Disaster Mitigation in Pacitan Regency]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 16(1), 19–38.
- Gillespie, S., Menon, P., & Kennedy, A. L. (2015). Scaling up impact on nutrition: what will it take? *Advances in Nutrition*, 6(4), 440–451.
- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Evidence Based Policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167–178.
- Jannah, Z. (2024). *Penanganan Stunting Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Pada Dinas Kesehatan Aceh*. UIN Ar-

- Raniry Banda Aceh.
- Majid, M., Tharihk, A. J., & Zarkasyi, R. (2022). *Cegah stunting melalui perilaku hidup sehat*. Penerbit NEM.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., Abdullah, F., Sulaiman, S., & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nugroho, R. (2022). *Foreign Policy: Politik dan Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Putri, P. C. N., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 333–340.
- Rani, B. M. (2024). *Peran Kebijakan Publik dalam Mendorong Inovasi Teknologi: Perspektif Pelaku Industri dan Pemerintah*. 4, 70–83.
- Rizky Nurfadani, T. M., & Hendiyani, M. F. (2025). *EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sahara, F., Tehubijuluw, Z., & Elake, N. (2025). Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Era Efisiensi Anggaran dengan Pendekatan Pentahelix pada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1840–1857.
- Sari, D. T. (2023). Government Health Expenditure and Stunting Prevalence Reduction in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(2), 192–208.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & SAP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Siregar, S. D. P., & Nasution, M. I. P. (2025). Peran Data Integration Dalam Mewujudkan Interoperabilitas Sistem Informasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Sitepu, R. K.-K. (2023). *Kajian pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah tahun 2023*. Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitrianingsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., & Setyorini, N. (2025). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., Iskandar, A., Praja, S. J., Susanti, I., & Boari, Y. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syahril, S. (2023). *ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PASANGKAYU= COMMUNITY PARTICIPATION ANALYSIS IN PREPARATION OF REGIONAL DEVELOPMENT WORK PLANS IN PASANGKAYU REGENCY*. Universitas Hasanuddin.
- Wisnantara, I., & Aser, M. S. (2025). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA*. IPDN.
- Yovitasari, C. A. (2024). *EFEKTIVITAS PERKONSULTASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI DKI JAKARTA*. Politeknik STIA LAN Jakarta.